



PEMERINTAH KOTA BATAM

# RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN 2025-2029



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA  
BATAM TAHUN 2025-2029**



**Disusun Oleh**  
**Sekretariat Daerah Kota Batam**  
**Bagian Perencanaan dan Keuangan**

**PEMERINTAH KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Batam yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan pedoman bagi Sekretariat Daerah Kota Batam dalam melaksanakan misinya melaksanakan koordinasi, sinkronisasi serta fasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan daerah.

Rencana Strategis (Renstra) ini digunakan sebagai acuan bagi Sekretariat Daerah yang akan dicapai pada periode 2025-2030. Dokumen ini sebagai dasar dalam menyusun perencanaan dan evaluasi Sekretariat Daerah Kota Batam.

Penyusunan Dokumen ini disajikan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Demikian kami sampaikan dokumen Renstra ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Batam, September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



**FIRMANSYAH, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda / IV C  
NIP 196804121989091002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar .....	v
Bab I Pendahuluan .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	8
1.3 Maksud Dan Tujuan .....	10
1.4 Sistematika Penulisan .....	10
Bab II Gambaran Pelayanan Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah .....	12
2.1.1 Struktur Organisasi .....	13
2.1.2 Uraian tugas dan jabatan struktural Sekretariat Daerah .....	13
2.2 Sumber daya Sekretariat Daerah .....	17
2.2.1 Sumber daya manusia .....	17
2.2.2 Sarana prasarana .....	19
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah .....	19
2.3.1 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah .....	19
2.3.2 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Sekretariat Daerah .....	20
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah .....	22
2.5 Permasalahan Dan Isu Strategis Sekretariat Daerah .....	22
2.5.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan .....	22
2.5.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	24
2.5.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi .....	24
2.5.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	24
2.5.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	25

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan.....	26
3.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah.....	26
3.2    Strategi Dan Arah Kebijakan .....	27
3.2.1 Strategi.....	27
3.2.2 Kebijakan .....	28
Bab IV Rencana Program Dan Kegiatan, Subkegiatan Dan Kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan.....	30
4.1 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah.....	30
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	42
Bab V Penutup .....	43

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Komposisi ASN Sekretariat Daerah Kota Batam.....	18
Tabel 2.2 Komposisi ASN Sekretariat Daerah Kota Batam berdasarkan Golongan	19
Tabel 2. 3 Komposisi ASN Sekretariat Daerah Kota Batam berdasarkan Pendidikan .....	19
Tabel 2. 4 Komposisi Non ASN Sekretariat Daerah Kota Batam Berdasarkan Jenis .....	19
Tabel 2. 5 Daftar Aset Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025 .....	20
Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Batam .....	22
Tabel 2. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota .....	23
Tabel 2. 8 Rumusan Permasalahan .....	34
Tabel 2. 9 Isu Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 .....	40
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Batam .....	43
Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	45
Tabel 3. 3 Penahapan Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 .....	46
Tabel 3. 4 Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 .....	46
Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam .....	50
Tabel 4. 2 Program dan Kegiatan Pendanaan Sekretariat Daerah.....	64
Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	79
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Batam.....	85
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah Kota Batam.....	85

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah .....	2
Gambar 1. 2 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	5
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batam.....	15

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

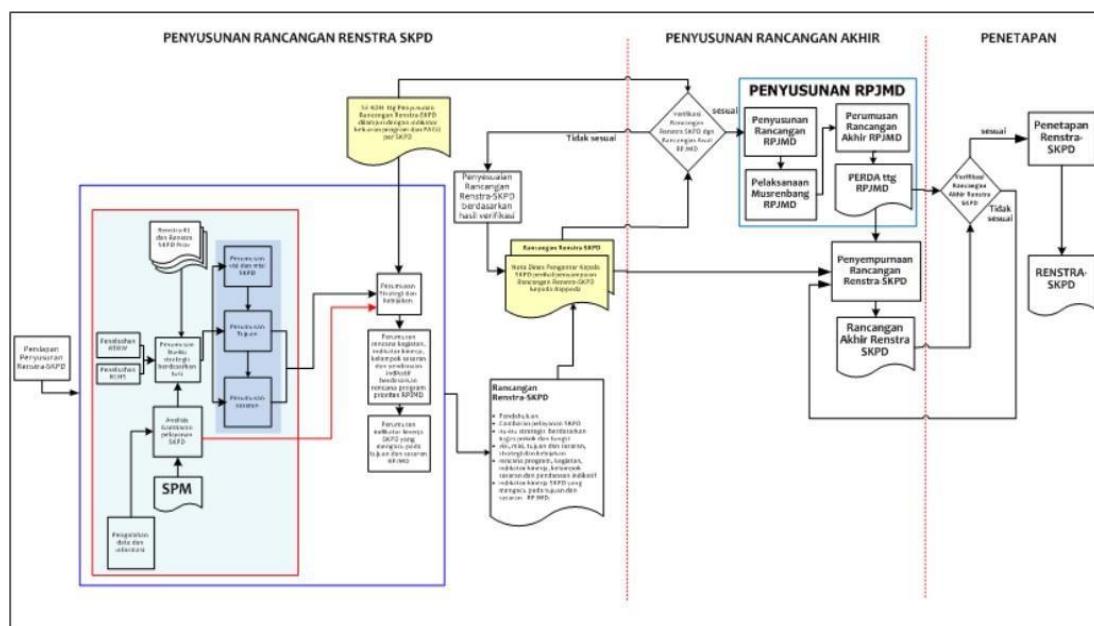
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Renstra berfungsi sebagai acuan untuk rencana kerja 5 (lima) tahun bagi Perangkat Daerah, dan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berperiode satu tahun, sebagai pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Renja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan Awal RKPD, sebagai bahan bagi Kepala Perangkat Daerah dalam mengoordinasikan penyusunan Rancangan RKPD, sebagai salah satu bahan/pedoman/acuan untuk pengendalian kebijakan Renja, dan sebagai salah satu bahan/pedoman/acuan untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. Rancangan Renstra Perangkat Daerah juga berfungsi sebagai salah satu bahan masukan dalam menyusun rancangan RPJMD.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Bagan alir atau tahapan/proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Persiapan penyusunan Renstra meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
- b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD

Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat

Daerah, berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam Rancangan Awal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah, dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam Rancangan Awal RPJMD.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan dibahas dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara tersebut.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD. Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

Bappeda melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Verifikasi bertujuan untuk memastikan Rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan Rancangan Awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara Forum Perangkat Daerah.

Dalam hal hasil ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda. Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Forum Perangkat

Daerah/Lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Surat Edaran Kepala Daerah diterima. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD

Selanjutnya Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi Kepala Bappeda, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bapelitbangda untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah paling

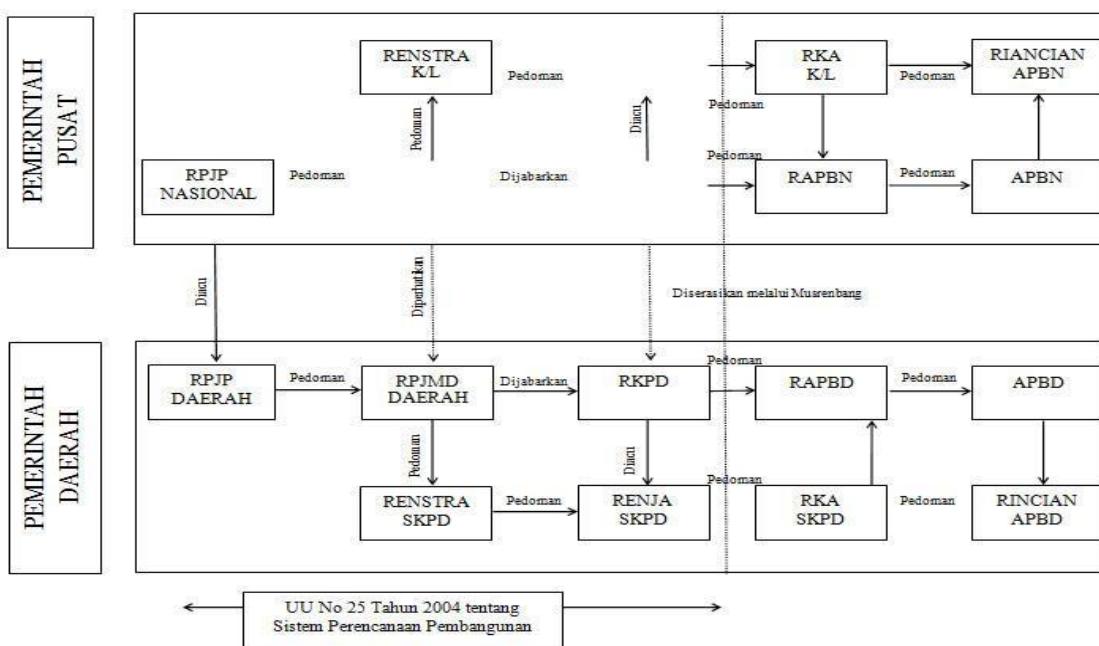
lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Perencanaan pembangunan nasional dan daerah menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu suatu dokumen perencanaan pembangunan saling terkait dengan dokumen perencanaan lainnya.

Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. 2 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra K/L memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra K/L dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam

rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain mengacu kepada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah juga harus mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan yang pada akhirnya Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);
  12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130);

13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 12 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1352);
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Batam tahun 2024 Nomor 1546);
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah untuk menentukan arah dan strategi kebijakan perencanaan pembangunan di Sekretariat Daerah Kota Batam selama periode 2025-2029 dengan mengacu pada RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah:

1. Menjamin keterkaitan, konsistensi, sinergisitas, dan keterpaduan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal, sekaligus juga dalam menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
2. Menyediakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya.

## **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisi dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Perangkat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini berisi tentang Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang disertai Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Selain itu juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disertai kondisi awal kinerja. Dan akhir kinerja yang berhubungan dengan Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

## Bab V Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan terdiri atas urusan Pemerintahan absolut, urusan Pemerintahan konkuren, dan urusan Pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan absolut adalah urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan Pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, namun diselenggarakan oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota di wilayah kerja masing-masing. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 12 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

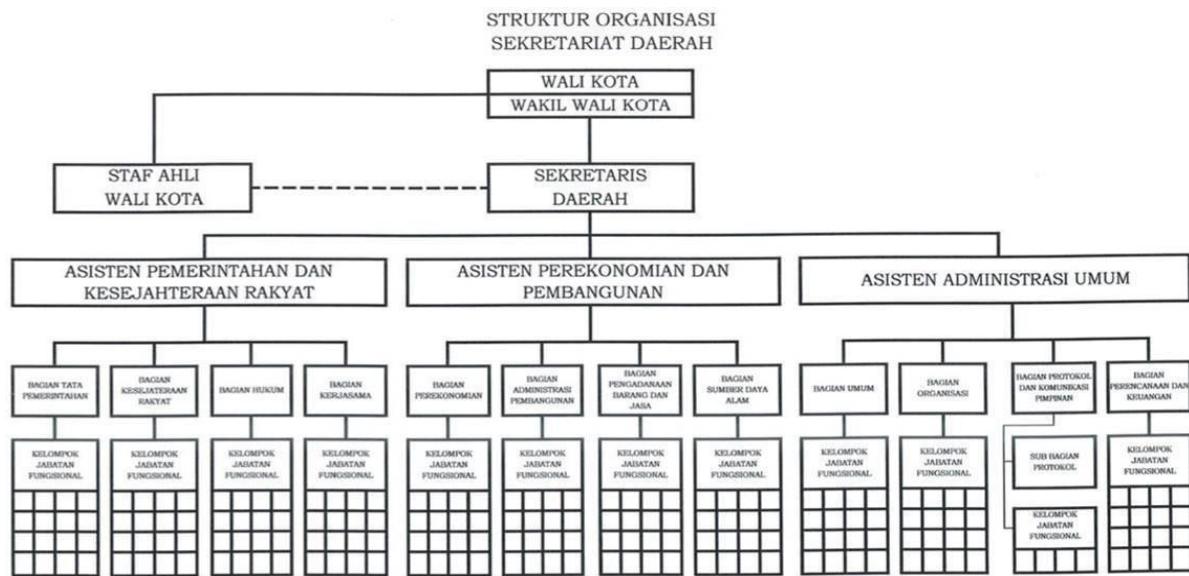
### **2.1.1 STRUKTUR ORGANISASI**

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batam terdiri dari Sekretaris Daerah, 3 Asisten dan 12 Bagian, secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah Kota, yang membawahi:
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terdiri dari:
  1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi:
    - Kepala Bagian Tata Pemerintahan
    - Kelompok Jabatan Fungsional
    - Kelompok Jabatan Pelaksana
  2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
    - Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
    - Kelompok Jabatan Fungsional
    - Kelompok Jabatan Pelaksana
  3. Bagian Kerja Sama, membawahi;
    - Kepala Bagian Kerja Sama
    - Kelompok Jabatan fungsional
    - Kelompok Jabatan pelaksana
  4. Bagian Hukum, membawahi:
    - Kepala Bagian Hukum
    - Kelompok Jabatan Fungsional
    - Kelompok Jabatan pelaksana
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang terdiri dari:
  1. Bagian Perekonomian, membawahi:
    - Kepala Bagian Perekonomian
    - Kelompok Jabatan fungsional
    - Kelompok Jabatan Pelaksana
  2. Bagian Sumber Daya Alam, membawahi:

- Kepala Bagian Sumber Daya Alam
  - Kelompok Jabatan Fungsional
  - Kelompok Jabatan Pelaksana
3. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
- Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
  - Kelompok Jabatan Fungsional
  - Kelompok Fungsional Umum
4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:
- Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
  - Kelompok Jabatan Fungsional
  - Kelompok Jabatan Pelaksana
- d. Asisten Administrasi Umum yang terdiri dari:
1. Bagian Umum, membawahi:
    - Kepala Bagian Umum
    - Kelompok Jabatan Fungsional
    - Kelompok Jabatan Pelaksana
  - 2 Bagian Organisasi, membawahi:
    - Kepala Bagian Organisasi
    - Kelompok Jabatan Fungsional
    - Kelompok Jabatan Pelaksana
  - 3 Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi:
    - Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
    - Kelompok Jabatan Fungsional
    - Kelompok Jabatan Pelaksana
  4. Bagian Protokol, membawahi:
    - Kepala Bagian Protokol
    - Kelompok Jabatan fungsional
    - Kelompok Jabatan Pelaksana

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batam



Sumber: Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2024

## **2.1.2 URAIAN TUGAS DAN JABATAN STRUKTURAL SEKRETARIAT DAERAH**

Dari struktur organisasi di atas dapat dijabarkan bahwa Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Batam. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah dibantu dan mengoordinasikan 3 (tiga) asisten di lingkungan Sekretariat Daerah yang meliputi:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
  2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan
  3. Asisten Administrasi Umum.  
  3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, kerja sama dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintah, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerja sama. Dalam melaksanakan tugas pokok Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;

- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerja sama;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerja sama yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:

- 1. Bagian Tata Pemerintahan
- 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
- 3. Bagian Hukum
- 4. Bagian Kerja Sama

#### 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemanantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta sumber daya alam. Dalam melaksanakan tugas pokok Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunya fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam;
- c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;

- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah berkaitan dengan tugasnya sesuai ketentuan undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:

1. Bagian Perekonomian
2. Bagian Administrasi Pembangunan
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4. Bagian Sumber Daya Alam

## 5. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan;
- c. pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
- d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; dan

- g. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Asisten Administrasi Umum membawahi:

1. Bagian Umum
2. Bagian Organisasi
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4. Bagian Perencanaan dan Keuangan

## **2.2. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DAERAH**

### **2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA**

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh perangkat daerah karena kinerja pegawai akan menentukan tingkat kinerja perangkat daerah tersebut. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah Kota Batam didukung oleh sumber daya manusia/aparatur dan sarana prasarana.

Sekretariat Daerah Kota Batam memiliki total 308 orang pegawai, yang terdiri atas 160 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 148 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tabel 2.1 Komposisi ASN Sekretariat Daerah Kota Batam

NO.	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
<b>ASN (PNS DAN PPPK)</b>		
1	Sekretaris Daerah	1
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1
3	Asisten Perekonominan	1
4	Asisten Administrasi Umum	1
5	Staff Ahli	3
6	Kepala Bagian	12
7	Jabatan Fungsional	62
8	Jabatan Fungsional Umum	79
9	PPPK	148
<b>JUMLAH</b>		<b>308</b>

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian Kota Batam Tahun 2025

Tabel 2.2 Komposisi ASN Sekretariat Daerah Kota Batam berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1	IV	21
2	III	128
3	II	11
4	I	-
5	Golongan Lainnya (PPPK)	148
	<b>JUMLAH</b>	<b>308</b>

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian Kota Batam, 2025

Tabel 2. 3 Komposisi ASN Sekretariat Daerah Kota Batam berdasarkan Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	PNS	PPPK	JUMLAH (ORANG)
1	S3	-	-	-
2	S2	30	-	30
3	S1	93	88	181
4	D4	9	2	11
5	D3	9	2	11
6	SMA/SMK	19	50	69
7	SD	-	6	6
	<b>JUMLAH</b>	<b>161</b>	<b>148</b>	<b>308</b>

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian Kota Batam, 2025

Tabel 2. 4 Komposisi Non ASN Sekretariat Daerah Kota Batam Berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	JENIS KELAMIN	PNS	PPPK	JUMLAH (ORANG)
1	Laki-Laki	95	89	184
2	Perempuan	65	59	124
	<b>JUMLAH</b>	<b>161</b>	<b>148</b>	<b>308</b>

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian Kota Batam, 2025

Dari Tabel 2.3 di atas, komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan adalah 30 orang S2 (9,74%), 181 orang S1 (58,7%), 11 orang D4 (3,57%), 11 orang D3 (3,57%), 69 orang SMA/SMK (22,4%), dan 6 orang SD (1,94%). Dengan komposisi jenjang pendidikan tersebut, memberi dampak

positif pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah. Namun demikian dengan perkembangan peraturan dan kebijakan yang sangat dinamis, maka kualitas SDM harus selalu meningkat melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas seperti pendidikan dan pelatihan berkala dan berkelanjutan.

### **2.2.2 SARANA PRASARANA**

Sarana dan Prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Sarana dan prasarana yang tersedia di Sekretariat Daerah berasal dari APBD. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 5 Daftar Aset Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI			
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT
1	Kendaraan Roda 4	112	Unit	99	-	-	13
2	Kendaraan Roda 2	27	Unit	25	-	-	2
3	Peralatan Kantor	3832	Unit	1359	-	-	943
4	Buku/Perpustakaan	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		3971	Unit	1483	-	-	958

Sumber: Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Batam, 2024

Sarana kantor dalam menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi SDM Sekretariat Daerah Kota Batam, seperti komputer, laptop, scanner dan printer sangat diperlukan. Selain itu, sarana dan prasarana yang ada juga memerlukan perawatan dan peremajaan secara berkala untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi dimaksud. Sedangkan aset tanah memerlukan pemeliharaan dalam bentuk pengurusan sertifikat.

### **2.3. KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH**

Pada bagian ini disajikan capaian dan anggaran yang telah di realisasikan dalam mencapai kinerja Sekretariat Daerah. Untuk merumuskan faktor-faktor penting dalam merencanakan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah

Kota Batam lima tahun ke depan, maka pengukuran kinerja terhadap target, sasaran dan program pada Renstra periode lalu penting untuk dilakukan. Dengan mengukur capaian target pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam periode lalu dan/atau indikator kinerja lainnya, akan didapatkan rumusan potensi dan permasalahan untuk dipertimbangkan dalam penyusunan Renstra periode berikutnya

### **2.3.1. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH**

Sekretariat Daerah Kota Batam merupakan unsur pendukung urusan pemerintahan. Hasil evaluasi kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Batam berdasarkan sasaran/target Renstra pada tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada Tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Batam

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Nilai LPPD			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
2.	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Keskretarian	-	-	82	88,31	89	90	91	85	87	90	90	-	100%	100%	100%	100%	-
3.	Nilai SAKIP	-	-	B	B	B	BB	BB	B	B	B	BB	-	100%	100%	100%	100%	-
4.	Persentase Ketidaksesuaian PMPRB Dengan Indeks RB	-	-	30%	25%	20%	15%	10%	25%	20%	NA	NA	-	100%	100%	100%	-	-
5	Persentase penerapan SOP di Lingkungan Pemerintah Kota Batam	-	-	80%	85%	90%	95%	100%	85%	87%	92%	97%	-	100%	100%	100%	100%	-

### **2.3.2. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH**

Pada bagian ini menjelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Sekretariat Daerah, mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Sekretariat Daerah. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah.

Tabel 2. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota

PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE-					REALISASI TAHUN KE-					RASIO TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGARAN	REALISASI
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		72.796.473.500	77.193.924.140	107.544.227.300	133.512.286.400		66.126.692.288	73.282.389.195	97.887.123.825	127.909.212.802	91	95	91	96		21.8	20.3
Administrasi Tata Pemerintahan		6.991.737.000	7.099.425.650	6.378.863.500	7.469.942.400		4.917.930.088	6.487.488.750	4.340.124.480	7.469.942.400	70	91	68	100		15.3	12.6
Penataan Administrasi Pemerintah		2.612.412.000	2.888.290.000	2.557.020.000	1.969.332.000		1.581.192.800	2.491.611.000	1.985.399.060	1.969.332.000	61	86	78	100		59.3	49.6
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		582.860.000	546.778.000	1.230.000	172.968.000		237.239.288	524.911.000	0	172.968.000	41	96	0	100		59.1	52.4
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		3.796.465.000	3.664.357.650	3.820.613.500	5.327.642.400		3.099.498.000	3.470.966.750	2.354.725.420	5.327.642.400	82	95	62	100		88.1	71.5
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		65.046.168.500	69.576.356.490	95.632.903.800	121.837.663.000		60.938.762.200	66.624.536.445	90.737.911.845	117.376.319.148	94	96	95	96		19.56	18.67
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		65.046.168.500	40.743.344.800	60.539.828.000	81.759.981.000		60.938.762.200	39.921.983.750	59.831.793.845	80.947.201.148	94	98	99	99		12.1	11.9
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		0	18.540.360.000	26.336.655.000	27.010.260.000		0	17.905.720.000	23.443.000.000	25.400.000.000	0	97	89	94		53.3	31.2
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		0	10.292.651.690	8.079.544.800	12.161.208.000		0	8.796.832.695	7.351.982.000	10.273.754.000	0	85	91	84		20.2	12.1
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun Kerjasama antar-Keluarga, warga dan Kelompok Masyarakat		0	0	676.876.000	906.214.000		0	0	111.136.000	755.364.000	0	0	16	83		22.6	18.8
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		345.000.000	433.928.000	9.975.000	715.031.000		240.000.000	109.800.000	0	601.508.504	70	25	0	84		62.2	59.3

PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE-					REALISASI TAHUN KE-					RASIO TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		0	0	0	9.815.000		0	0	0	9.690.000	0	0	0	99		0	0
Fasilitasi Bantuan Hukum		345.000.000	433.928.000	9.975.000	693.820.000		240.000.000	109.800.000	0	583.476.704	70	25	0	84		61.7	58.9
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		0	0	0	11.396.000		0	0	0	8.341.800	0	0	0	73		4.3	4.1
Fasilitasi Kerjasama Daerah		413.568.000	84.214.000	5.522.485.000	3.489.650.000		30.000.000	60.564.000	2.809.087.500	2.461.442.750	7	72	51	71		64.7	34.8
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		402.318.000	72.500.000	5.512.885.000	3.486.550.000		30.000.000	52.500.000	2.807.837.500	2.458.542.750	7	72	51	71		64.5	34.7
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		11.250.000	11.714.000	1.500.000	1.550.000		0	8.064.000	0	1.450.000	0	69	0	94		13.6	11.1
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		0	0	8.100.000	1.550.000		0	0	1.250.000	1.450.000	0	0	15	94		38.7	38.7
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		1.375.432.100	1.829.891.675	1.346.551.850	1.432.533.200		1.152.130.291	1.757.812.544	1.268.335.116	1.349.588.949	84	96	94	94		35.3	33.6
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		505.925.000	694.023.425	555.168.000	618.108.000		425.430.026	658.617.655	529.017.400	578.111.100	84	95	95	94		14.0	13.3
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		83.113.000	282.507.500	95.974.000	158.734.000		70.339.580	272.193.000	92.174.400	144.558.700	85	96	96	91		41.8	40.0
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		422.812.000	372.633.625	370.430.000	370.610.000		355.090.446	351.831.955	352.980.000	349.638.400	84	94	95	94		83.5	79.2
Peencanaan dan Pengawasan Ekonomi Kecil		0	38.882.300	88.764.000	88.764.000		0	34.592.700	83.863.000	83.914.000	0	89	94	95		110.95	104.84
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		100.200.000	94.069.300	131.315.000	129.341.000		95.640.000	85.101.701	129.405.000	126.550.000	95	90	99	98		25.7	24.6
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		0	35.350.000	21.615.000	105.650.000		0	31.447.000	20.485.000	104.128.000	0	89	95	99		48.0	46.5

PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE-					REALISASI TAHUN KE-					RASIO TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		85.200.000	18.179.300	100.800.000	12.465.000		80.640.000	15.319.500	100.230.000	11.976.000	95	84	99	96		122.09	118.54
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		15.000.000	40.540.000	8.900.000	11.226.000		15.000.000	38.335.201	8.690.000	10.446.000	100	95	98	93		52.2	49.6
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		747.557.100	1.006.755.700	628.548.600	647.234.200		616.060.265	980.003.188	580.265.716	608.624.449	82	97	92	94		17.9	17.1
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		139.520.000	116.317.100	48.850.000	20.545.000		103.900.000	109.880.000	39.700.000	19.721.500	74	94	81	96		17.0	15.4
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		512.419.100	703.403.600	474.082.600	569.008.200		441.042.735	689.903.950	447.056.000	545.816.000	86	98	94	96		13.1	12.7
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		95.618.000	187.035.000	105.616.000	57.681.000		71.117.530	180.219.238	93.509.716	43.086.949	74	96	89	75		30.7	28.4
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		21.750.000	35.043.250	31.520.250	37.850.000		15.000.000	34.090.000	29.647.000	36.303.400	69	97	94	96		76.0	72.8
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan		0	11.364.750	11.262.750	13.590.000		0	11.045.000	10.592.000	13.087.400	0	97	94	96		24.8	13.5
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		21.750.000	11.300.750	9.814.750	11.825.000		15.000.000	10.985.000	9.197.000	11.350.000	69	97	94	96		24.0	23.01
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		0	12.377.750	10.442.750	12.435.000		0	12.060.000	9.858.000	11.866.000	0	97	94	95		22.8	12.4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		110.162.744.453	#####	118.555.973.613			92.246.768.294	#####	99.066.596.478	100.954.602.632	84	87	84	0		23.8	22.8
Perencanaan, Penganggaran, dan		45.750.000	107.276.000	115.210.000	196.679.000		39.250.000	81.246.000	87.681.000	183.342.000	86	76	76	93		27.1	21.4

PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE-					REALISASI TAHUN KE-					RASIO TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		31.750.000	74.174.000	80.786.000	94.900.000		31.750.000	61.969.000	0	89.948.000	100	84	0	95		17.8	16.9
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		14.000.000	33.102.000	34.424.000	101.779.000		7.500.000	19.277.000	16.330.000	93.394.000	54	58	47	92		92.9	58.9
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		32.846.064.596	36.287.660.641	33.539.625.751	43.648.780.448		31.758.307.767	33.725.628.315	32.723.903.772	42.326.905.084	97	93	98	97		80.7	77.0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		32.508.444.596	36.050.930.641	33.317.045.751	43.648.780.448		31.426.687.767	33.493.898.315	32.507.323.772	42.326.905.084	97	93	98	97		80.2	76.5
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		337.620.000	236.730.000	222.580.000	0		331.620.000	231.730.000	216.580.000	0	98	98	97	0		45.9	44.8
Administrasi Kepegawai dan Perangkat Daerah		0	265.978.000	145.756.000	227.295.000		0	198.349.058	131.743.220	166.293.462	0	75	90	73		32.9	17.3
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0	265.978.000	145.756.000	227.295.000		0	198.349.058	131.743.220	166.293.462	0	75	90	73		37.3	29.8
Administrasi Umum Perangkat Daerah		19.413.667.600	16.726.221.197	19.886.658.500	20.736.674.500		11.860.404.945	13.883.361.786	13.707.311.517	17.632.325.906	61	83	69	85		41.7	31.9
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2.122.529.500	3.026.917.150	3.229.635.000	3.562.668.000		1.323.879.800	2.360.092.850	2.917.644.000	3.161.792.000	62	78	90	89		71.4	60.6
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		8.635.275.500	6.913.921.297	9.300.682.000	10.427.327.500		7.656.641.100	6.218.102.848	6.375.593.160	9.077.921.119	89	90	69	87		18.8	14.8
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		995.500.100	810.507.750	854.962.500	654.450.000		379.488.315	356.030.930	603.344.758	465.382.845	38	44	71	71		18.2	10.7
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		7.660.362.500	5.974.875.000	6.501.379.000	6.092.229.000		2.500.395.730	4.949.135.158	3.810.729.599	4.927.229.942	33	83	59	81		13.999.31 1.025	9.991.672.018

PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE-					REALISASI TAHUN KE-					RASIO TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGARAN	REALISASI
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		9.458.380.000	15.187.758.244	1.709.157.200	450.852.000		8.977.713.000	13.558.891.863	1.310.560.000	438.200.000	95	89	77	97		17.0	14.97
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan		6.749.370.000	6.251.129.000	484.095.000	0		6.474.300.000	5.364.478.000	413.100.000	0	96	86	85	0		6.73	5.77
Pengadaan Mebel		1.017.350.000	895.810.000	136.100.000	81.750.000		940.965.000	866.294.000	134.900.000	78.300.000	92	97	99	96		10.5	10.2
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1.691.660.000	8.040.819.244	1.088.962.200	369.102.000		1.562.448.000	7.328.119.863	762.560.000	359.900.000	92	91	70	98		9.22	8.18
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		20.358.493.440	22.286.101.640	21.479.440.800	19.301.087.600		16.800.584.843	18.983.395.438	18.198.977.313	15.042.441.801	83	85	85	78		48.5	40.9
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		7.872.760.000	7.914.320.000	7.354.120.000	9.076.030.000		6.563.115.106	6.685.946.259	6.070.762.827	6.147.408.661	83	84	83	68		17.5	14.2
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		801.300.000	741.850.000	634.200.000	722.200.000		309.060.000	510.127.000	552.330.000	497.028.000	39	69	87	69		15.5	11.8
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		11.684.433.440	13.629.931.640	13.491.120.800	9.502.857.600		9.928.409.737	11.787.322.179	11.575.884.486	8.398.005.140	85	86	86	88		29.49	25.4
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		17.090.017.828	20.833.311.352	26.431.148.556	25.714.994.950		15.686.827.900	18.473.151.840	20.499.217.628	17.512.383.991	92	89	78	68		53.6	43.3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Pemorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0	0	0	351.760.000		0	0	0	316.296.500	0	0	0	90		1.32	1.28
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau		7.460.879.000	12.109.522.430	512.120.000	16.719.707.650		6.540.209.195	10.466.855.158	396.098.000	8.962.113.300	88	86	77	54		16.8	13.1

PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE-					REALISASI TAHUN KE-					RASIO TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lapangan																	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.629.138.828	8.723.788.922	16.098.156.750	8.643.527.300		9.146.618.705	8.006.296.682	10.857.472.350	8.233.974.191	95	92	67	95		26.9	20.9	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5.537.208.289	4.472.883.902	9.820.871.806	5.679.932.737		2.755.433.080	2.445.751.970	9.245.647.278	2.878.683.950	50	55	94	51		15.71	12.4	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.787.208.289	2.872.883.902	2.635.386.031	3.894.932.737		1.081.233.080	853.551.970	968.064.424	1.215.389.950	29	30	37	31		6.48	2.12	
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.750.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	1.785.000.000		1.674.200.000	1.592.200.000	1.551.900.000	1.663.294.000	96	100	97	93		3.64	3.55	
Fasilitasi Keruangan Kantor Sekretariat Daerah	1.877.364.700	1.236.400.878	3.316.078.000	4.802.845.800		1.134.304.000	884.652.300	1.618.268.900	3.048.232.600	60	72	49	63		5.75	3.26	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	952.723.100	626.453.246	1.810.077.000	2.701.484.400		587.504.600	413.324.300	792.912.200	1.898.148.700	62	66	44	70		3.11	1.60	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	924.641.600	609.947.632	1.506.001.000	2.101.361.400		546.799.400	471.328.000	825.356.700	1.150.083.900	59	77	55	55		2.64	1.58	
Penataan Organisasi	2.099.368.000	1.964.408.450	1.729.413.000	1.649.313.000		1.900.364.100	1.769.093.100	1.177.756.570	1.447.582.300	91	90	68	88		4.10	3.30	
Pengembangan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	445.474.000	506.881.400	324.252.000	296.223.000		428.186.000	445.591.500	198.990.440	223.890.440	96	88	61	76		90.5	70.0	
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	483.612.000	505.142.950	291.776.500	415.826.000		443.132.000	448.711.000	262.817.690	381.901.000	92	89	90	92		90.0	80.7	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	402.800.000	173.860.500	104.424.000	48.199.000		369.350.000	166.394.600	82.222.220	42.774.220	92	96	79	89		29.0	25.9	

PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE-					REALISASI TAHUN KE-					RASIO TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		602.932.000	518.852.600	799.025.500	773.667.000		500.730.300	465.408.000	515.880.000	709.571.520	83	90	65	92		15.1	11.5
Koordinasi dan Perusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		164.550.000	259.671.000	209.935.000	115.398.000		158.965.800	242.988.000	117.846.220	89.445.120	97	94	56	78		49.8	38.3
Protokol dan Komunikasi Pimpinan		1.436.430.000	636.390.000	528.370.000	465.771.000		1.333.578.659	582.481.600	497.272.500	444.505.000	93	92	94	95		12.8	11.9
Fasilitasi Keprotokolan		1.436.430.000	636.390.000	302.025.000	298.275.000		1.333.578.659	582.481.600	279.672.500	282.825.000	93	92	93	95		10.1	9.32
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		0	0	206.500.000	166.508.000		0	0	198.700.000	160.780.000	0	0	96	97		41.6	40.1
Pendokumentasian Tugas Pimpinan		0	0	19.845.000	988.000		0	0	18.900.000	900.000	0	0	95	91		24.6	22.4

## **2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN**

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Sekretariat Daerah Kota Batam, maka yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran adalah:

- a. Internal : seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam dalam rangka koordinasi kebijakan dan akuntabilitas.
- b. Eksternal : DPRD, masyarakat (melalui layanan administrasi publik), dan *stakeholders* (BUMD, investor terkait perizinan koordinatif).

## **2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH**

**Kekuatan (Strengths),** Kota Batam memiliki keunggulan komparatif berupa posisi strategis sebagai pusat ekonomi dan kawasan perdagangan yang terintegrasi dengan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), serta pengalaman administrasi pemerintahan yang relatif matang yang mendukung fungsi koordinatif Sekretariat Daerah Kota Batam. Dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Batam menjadi pedoman yang jelas untuk penetapan prioritas program dan alokasi sumber daya, sehingga Sekretariat Daerah Kota Batam dapat merumuskan langkah-langkah operasional yang terukur untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan kota. Peran ini diperkuat oleh sinergi regional dengan arah pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang menekankan penguatan konektivitas maritim dan tata kelola pemerintahan.

**Kelemahan (Weaknesses),** Meskipun kerangka perencanaan tersedia, implementasi operasional terkendala oleh sejumlah kelemahan struktural. Pertama, kualitas data masih terfragmentasi antar PD dan belum tersedia satu sumber data terpadu yang andal untuk monitoring dan evaluasi (M & E) sehingga pelaporan IKU/IKK kurang konsisten. Kedua, kapasitas SDM khususnya pada ranah digital *governance*, analitik data, dan manajemen kinerja masih terbatas sehingga transformasi layanan dan integrasi sistem berjalan lambat. Ketiga, Renstra saat ini memperlihatkan inkonsistensi angka dan dokumen (misal variasi angka SDM/aset) yang menuntut verifikasi administrasi sebelum penetapan target; kondisi ini mengurangi kredibilitas *baseline* yang dibutuhkan untuk target jangka menengah.

Temuan-temuan ini relevan mengingat kebutuhan pemerintahan daerah untuk respons cepat terhadap perubahan kondisi ekonomi dan investasi.

**Peluang (Opportunities),** Terdapat peluang strategis yang dapat dimanfaatkan Sekretariat Daerah untuk menutup *gap* kelemahan di atas. Secara nasional, arah pembangunan baru (Asta Cita) menempatkan modernisasi birokrasi, peningkatan kualitas SDM, dan transformasi digital sebagai misi prioritas — hal ini membuka ruang bagi pendanaan dan program nasional yang sejalan untuk *capacity building* dan digitalisasi layanan daerah. Selain itu, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau yang baru disahkan menegaskan dukungan terhadap peningkatan tata kelola, koneksi maritim, dan iklim investasi; momentum hukum dan politis ini dapat digunakan untuk menyelaraskan program kota dengan skema pendanaan provinsi dan inisiatif lintas daerah. Inisiatif strategis nasional dan proyek sektoral (misal koridor investasi dan pembangunan Kawasan Terpadu di Batam) juga dapat menjadi sumber kolaborasi teknis dan pendanaan.

**Ancaman (Threats),** Di sisi lain, ada sejumlah ancaman eksternal dan internal yang harus dimitigasi. Perubahan kebijakan nasional atau regulasi terkait kawasan khusus dan perizinan dapat terjadi cepat dan berdampak pada prioritas program kota; persaingan regional untuk menarik investasi juga menuntut respon cepat dan kualitas layanan yang tinggi. Keterbatasan fiskal menjadi risiko nyata—terutama ketika kebutuhan pendanaan untuk digitalisasi, infrastruktur, dan *capacity building* bersaing dengan kebutuhan dasar pelayanan publik—sehingga perlu mekanisme prioritisasi anggaran dan business case yang kuat. Selain itu, apabila koordinasi antar perangkat daerah tidak diformalkan dan diawasi, ada risiko ketidakselarasan program yang menyebabkan duplikasi investasi atau program tidak optimal.

Mengingat SWOT di atas, Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam harus memanfaatkan momentum legal-politik RPJMD (provinsi dan kota) dan perhatian nasional pada Asta Cita untuk memperoleh alokasi anggaran dan dukungan teknis bagi dua prioritas: (1) *digitalisasi dan integrasi data* (pembangunan dashboard M & E, arsitektur data terpadu, migrasi proses administrasi kunci ke *e-office*), dan (2) *capacity building* (peta kompetensi, modul sertifikasi *digital governance*, pelatihan M & E). Untuk mitigasi ancaman, segera formalkan mekanisme koordinasi lintas PD melalui SOP, SK penanggungjawab, dan forum koordinasi tematik yang terjadwal —

langkah ini menurunkan risiko ketidakselarasan program dan mempercepat realisasi investasi. Praktik implementasi harus disertai indikator kinerja terukur (misal persentase IKU terintegrasi di dashboard; persentase layanan administratif terdigitalisasi; persentase ASN tersertifikasi) dengan baseline 2024 dan target bertahap 2025–2029 agar efektivitas kebijakan dapat dipantau dan dievaluasi. Dengan pendekatan ini, Sekretariat Daerah Kota Batam dapat menempatkan diri sebagai fasilitator perubahan yang memberi efek *leverage* terhadap capaian RPJMD Kota Batam dan kontribusi terhadap prioritas Provinsi Kepri serta Asta Cita nasional.

## **2.6. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM**

Perumusan permasalahan pada Sekretariat Daerah Kota Batam dilakukan dengan mempertimbangkan lingkungan kebijakan yang lebih luas dari agenda pembangunan nasional (Asta Cita) hingga prioritas pembangunan provinsi Kepulauan Riau dan arahan strategis RPJMD Kota Batam. Arah kebijakan nasional yang dikenal sebagai **Asta Cita** merumuskan delapan misi prioritas pemerintahan yang menekankan percepatan kesejahteraan, pemerataan pembangunan, penguatan sumber daya manusia, serta transformasi layanan publik dan tata kelola sebagai bagian dari target menuju Indonesia Emas 2045; oleh karena itu, Renstra Perangkat Daerah harus membaca dan menerjemahkan mandat-mandat nasional ini agar program daerah mendukung target nasional secara terukur.

Di tingkat provinsi, RPJMD Kepulauan Riau menegaskan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif—dengan keunggulan maritim dan konektivitas—serta prioritas pada pemerataan infrastruktur dan penguatan SDM; kebijakan provinsi ini menjadi kerangka rujukan yang wajib diselaraskan oleh RPJMD Kota Batam mengingat keterkaitan spasial, ekonomi dan administratif antara Batam dan provinsi. Penyelarasan ini telah ditegaskan kembali dalam proses penetapan RPJMD Kepulauan Riau Tahun 2025–2029, sehingga Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam harus memperhitungkan isu-isu provinsi yang berdampak langsung pada kewenangan koordinatif dan administratif kota.

Kembali kepada isu strategis yang merupakan permasalahan utama yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah serta memerlukan perhatian dan penanganan khusus dari perangkat daerah. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Batam, identifikasi isu strategis dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan renstra periode sebelumnya, hasil analisis lingkungan strategis internal dan eksternal, serta keterkaitannya dengan arah kebijakan dan isu strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025–2029.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi koordinatif, Sekretariat Daerah Kota Batam memegang peran strategis dalam menjembatani kebijakan antar perangkat daerah, memastikan sinergi perencanaan dan penganggaran, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, isu-isu strategis yang diidentifikasi dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan turunan logis dari isu-isu strategis pembangunan Kota Batam yang tercantum dalam RPJMD Kota Batam, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, peningkatan kapasitas aparatur, dan reformasi birokrasi.

Identifikasi keterkaitan ini menjadi penting agar arah kebijakan dan strategi Sekretariat Daerah Kota Batam dapat secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan pelaksanaan fungsi koordinasi, perencanaan, administrasi pemerintahan, serta pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota Batam dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata.

#### **2.6.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur pembantu Pimpinan Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Batam, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Batam. Sekretariat Daerah Kota Batam bertugas membantu Wali Kota Batam dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi,

organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kota Batam. Sekretariat Daerah Kota Batam dibantu oleh 3 (tiga) asisten, yang masing-masing asisten melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Kelemahan sistem kerja, rendahnya literasi digital ASN, belum terintegrasinya sistem informasi manajemen, serta belum optimalnya pemanfaatan data kinerja dalam pengambilan keputusan menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan masih perlu diperkuat menuju model yang lebih adaptif dan berbasis digital.

Dalam konteks peran Sekretariat Daerah Kota Batam sebagai *policy coordination unit*, isu ini menuntut peningkatan efektivitas koordinasi lintas sektor, transformasi budaya kerja ASN, penguatan sistem akuntabilitas kinerja, serta percepatan digitalisasi administrasi pemerintahan agar mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan Kota Batam yang cerdas, transparan, dan berorientasi hasil.

Tabel 2. 8 Rumusan Permasalahan

No	Aspek	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya perwujudan <i>good government</i>	Keterbatasan kapasitas koordinasi lintas perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum jelasnya mekanisme koordinasi antar-OPD.</li> <li>- Belum tersedianya SOP koordinasi yang baku</li> </ul>
			Rendahnya komitmen dan komunikasi lintas sektor
		Keterfragmentasian data dan belum optimalnya integrasi sistem informasi pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem informasi antar-OPD belum terintegrasi</li> <li>- Standar data dan metadata belum seragam</li> <li>- Literasi digital ASN masih rendah</li> </ul>
		Kesenjangan kapasitas SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN belum merata</li> <li>- Penempatan ASN berbasis kompetensi belum maksimal</li> <li>- Keterbatasan insentif untuk peningkatan kapasitas</li> </ul>
		Tantangan infrastruktur dan konektivitas antarpulau/antarkawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi geografis kepulauan menyebabkan biaya tinggi</li> <li>- Infrastruktur TIK dan transportasi belum memadai/merata</li> <li>- Belum ada rencana terpadu penguatan konektivitas</li> </ul>
		Keterbatasan fiskal dan kebutuhan prioritisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketergantungan terhadap dana transfer pusat</li> </ul>

		anggaran	- PAD belum optimal
			- Perencanaan anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja
		Akses informasi publik dan mekanisme aspirasi belum sepenuhnya efisien	Belum optimalnya transparansi aduan publik

Berdasarkan analisis kesenjangan antara kondisi nyata (realita implementasi 2020–2024) dan kondisi ideal yang dirumuskan dalam RPJMD Kota Batam, terdapat beberapa permasalahan dominan yang berpotensi menjadi isu strategis Perangkat Daerah:

- 1) Keterbatasan kapasitas koordinasi lintas perangkat daerah yang menghambat percepatan perizinan, pengelolaan kawasan strategis, dan penanganan masalah lintas sektoral;
- 2) Keterfragmentasi data dan belum optimalnya integrasi sistem informasi pemerintahan yang melemahkan fungsi monitoring-evaluasi (M & E) dan akuntabilitas;
- 3) Kesenjangan kapasitas SDM, terutama pada kompetensi digital, manajemen kinerja, dan pengelolaan kebijakan kompleks;
- 4) Tantangan infrastruktur dan konektivitas antarpulau/antarkawasan yang berdampak pada pemerataan layanan dan investasi; serta
- 5) Keterbatasan fiskal dan kebutuhan prioritisasi anggaran yang memaksa pilihan kebijakan dan program yang harus selaras dengan sasaran RPJMD provinsi dan nasional.
- 6) Akses informasi publik dan mekanisme aspirasi belum sepenuhnya efisien sehingga menyebabkan terjadinya reduksi akuntabilitas dan kepercayaan publik

Selanjutnya, permasalahan tersebut dianalisis dalam konteks lingkungan dinamis. **isu global** (perubahan iklim, gangguan rantai pasok maritim, dan percepatan digitalisasi global), **isu nasional** (prioritas Asta Cita berupa percepatan pemerataan, penguatan SDM, dan modernisasi tata kelola), serta **isu regional/provinsi** (kebutuhan konektivitas maritim dan kebijakan prioritas Kepri untuk pertumbuhan inklusif).

## **2.6.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Batam serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Batam pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Batam menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Batam baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Batam untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

### **"Batam Kota Madani yang Inovatif, Berbudaya dan Berkelanjutan sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata"**

Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Batam di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Adapun rumusan pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**Madani dan Berbudaya** berarti madani dan berbudaya menggambarkan kondisi masyarakat Kota Batam yang beradab dan berperilaku baik. Tata nilai atau norma budaya merupakan modal utama dalam upaya mewujudkan masyarakat madani. Hal tersebut menjadi dasar dikarenakan budaya merupakan cara pola kehidupan yang meliputi pengetahuan, sikap, pola perilaku, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh masyarakat tertentu sebagai bukti keberlangsungan suatu peradaban manusia untuk mengatasi

berbagai persoalan, rintangan dan kesukaran hidup guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang bersifat tertib dan damai.

**Inovatif** berarti pemerintahan yang menerapkan ide-ide baru dan kreatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Inovasi ini dapat dilakukan di semua bidang, seperti peningkatan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan serta segala hal yang berhubungan dengan pelayanan publik. Pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah wajib berinovasi dan mengembangkan kreativitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kreativitas dan inovasi yang ada diharapkan dapat diimplementasikan kepada masyarakat dan bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Berkelanjutan** berarti Kota Batam mengalami pertumbuhan yang pesat dan merupakan salah satu dari penyumbang terbesar perekonomian provinsi dan nasional, sehingga perlu menerapkan konsep berkelanjutan dalam setiap aspek pembangunan karena di sisi lain, terjadi eksternalitas negatif dari pembangunan ekonomi yang berpotensi menghalangi terciptanya suatu *inclusive green economy*.

**Pusat Investasi dan Pariwisata** berarti perwujudan Kota Batam sebagai pusat investasi adalah investasi yang masuk Kota Batam diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat, dengan begitu hal ini dapat mengatasi angka pengangguran. Artinya, dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah maka diharapkan kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik.

Visi Kota Batam periode 2025-2029 menitikberatkan pada perwujudan kota madani yang inovatif, berkelanjutan dan berbudaya. Arah pertumbuhan ekonomi Kota Batam yaitu dengan memaksimalkan potensi Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata terdepan di Asia Tenggara, sehingga mampu mensejahterakan dan memajukan Kota Batam yang dapat dirasakan masyarakat secara merata.

Dalam mewujudkan visi tersebut dilaksanakan melalui langkah strategis melalui beberapa misi. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi

tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Misi diterjemahkan ke dalam butir-butir penjelasan yang mudah dipahami dan memudahkan penerjemahannya ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur. Misi harus dapat menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka mewujudkan visi jangka menengah. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Dari keterkaitan visi dengan pokok visi serta memperhatikan perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Batam Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global;
2. Mewujudkan pemertaan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan;
3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *good governance*;
5. Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sekretariat Daerah Kota Batam mengemban misi ke 4 (empat) dari misi-misi Kepala Daerah yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang *Good Governance*

#### **2.6.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI**

Tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Berbasis Digital dengan sasaran sebagai berikut:

Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, berbasis TI dan berorientasi pelayanan.

Hal ini sudah selaras dengan Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 yang pada periode ini fokus pada peningkatan

koordinasi, fasilitasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien

#### **2.6.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Dalam penyelenggaraan pemerintah, Sekretariat Daerah Kota Batam memiliki tugas pokok penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Terkait dengan telaahan Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Sekretariat Daerah Kota Batam tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung dengan RTRW dan KHLS, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai RTRW dan KHLS.

#### **2.6.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis Sekretariat Daerah sebagai berikut:

1. Penguatan mekanisme koordinasi dan tata kelola lintas OPD untuk mempercepat layanan dan sinergi program
2. Integrasi sistem informasi dan dashboard kinerja untuk mendukung M & E dan akuntabilitas
3. Penguatan kapasitas ASN (digital & manajerial) untuk mendukung transformasi layanan dan koordinasi
4. Peningkatan kapabilitas koordinatif untuk mendukung iklim investasi dan layanan terpadu bagi investor.
5. Strategi pembiayaan dan prioritisasi program guna menjamin kelanjutan program strategi Renstra.
6. Penguatan mekanisme transparansi, aduan publik, dan partisipasi untuk meningkatkan akuntabilitas.

Tabel 2. 9 Isu Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Pemasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1. Peran koordinatif Sekretariat	Koordinasi lintas perangkat daerah belum	KLHS RPJMD memuat kebutuhan tata		Tata Kelola dan akuntabilitas	Kualitas Tata Kelola Pemerinta	Penguatan mekanisme koordinasi dan

<b>Potensi Daerah yang Menjadi</b>	<b>Pemasalahan PD</b>	<b>Isu KLHS yang Relevan dengan PD</b>	<b>Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD</b>			<b>Isu Strategis PD</b>
			<b>Pemerintah</b>	<b>han dan Pelayanan Publik</b>	<b>tata kelola lintas PD untuk mempercepat layanan dan sinergi program.</b>	
sebagai penghubung antar-OPD dan fasilitator kebijakan.	terstandar (SOP/flow/pena ngung jawab), mengakibatkan tumpang tindih tugas dan keterlambatan penyelesaian perizinan & kebijakan lintas sektoral.	kelola yang lebih terpadu; relevan karena hambatan koordinasi mempengaruhi pelaksanaan program terpadu.		Pemerintah	han dan Pelayanan Publik	tata kelola lintas PD untuk mempercepat layanan dan sinergi program.
2. Kewenangan administrasi & M&E (monitoring evaluasi) di Sekretariat.	Data terfragmentasi; tidak ada dashboard kinerja terpadu → sulit pantau capaian IKU/IKK dan evaluasi program cepat.	KLHS/RPJMD menekankan integrasi data untuk perencanaan berkelanjutan — relevan untuk akurasi perencanaan PD.				Integrasi sistem informasi dan dashboard kinerja untuk mendukung M & E dan akuntabilitas.
3. Akses terhadap SDM administratif berpengalaman.	Kesenjangan kompetensi ASN di bidang digital governance, manajemen kinerja, fasilitasi kebijakan kompleks.	Renstra PD mengarahkan peningkatan kapasitas aparatur (selaras RPJMD Batam: good governance).				Penguatan kapasitas ASN (digital & manajerial) untuk mendukung transformasi layanan dan koordinasi.
4. Posisi strategis Batam & peran sebagai KPBPB (kawasan perdagangan/dag ang).	Keterbatasan prosedur koordinasi untuk isu lintas batas (investasi, perizinan) → hambatan iklim investasi & promosi.	RPJMD Batam memprioritaskan peningkatan iklim investasi & promosi; KLHS relevan untuk pengelolaan kawasan.				Peningkatan kapabilitas koordinatif untuk mendukung iklim investasi dan layanan terpadu bagi investor.
5. Keterbatasan fiskal / tekanan prioritas anggaran.	Kebutuhan program prioritas melebihi alokasi; risiko program kurang finansial untuk digitalisasi dan capacity building.	RPJMD & KLHS menekankan prioritasasi program & pembelian berkelanjutan.				Strategi pembiayaan dan prioritasasi program guna menjamin kelanjutan program strategi Renstra.
6. Kebutuhan peningkatan transparansi & partisipasi publik.	Akses informasi publik dan mekanisme aspirasi belum sepenuhnya efisien → reduksi akuntabilitas & kepercayaan publik.	RPJMD Batam menekankan good governance dan partisipasi masyarakat; KLHS relevan pada isu keberlanjutan kebijakan publik.				Penguatan mekanisme transparansi, aduan publik, dan partisipasi untuk meningkatkan akuntabilitas.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Sesuai arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa tujuan dan sasaran setiap Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Kota Batam berpedoman pada visi dan misi Wali Kota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

#### **3.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH**

Penetapan tujuan Sekretariat Daerah Kota Batam mengacu pada misi keempat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2025-2029 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang *Good Governance*. Untuk dapat melaksanakan misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran daerah. Tujuan daerah dari misi keempat ini adalah meningkatnya implementasi reformasi birokrasi menuju pemerintah daerah yang berdaya saing. Untuk sasaran daerah, Sekretariat Daerah Kota Batam mendukung sasaran yaitu meningkatnya pelayanan publik dengan indikator Indeks Pelayanan Publik.

Dari sasaran ini kemudian dirumuskan tujuan Sekretariat Daerah Kota Batam yaitu **“Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, adaptif, kolaboratif, efektif dan efisien.”** Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka sasaran yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan hukum dan kesejahteraan rakyat yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh rakyat masyarakat
2. Meningkatnya perekonomian dan pembangunan daerah kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing

### 3. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Batam

NPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					KET
				2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Menyusun Kebijakan Pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Peangkat Daerah serta Pelayanan administratif	Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel, adaptif, kolaboratif, efektif dan efisien		Nilai LPPD	3.41	3.42	3.44	3.46	3.47	
			Indeks Reformasi Birokrasi	84.25	84.50	84.75	85.00	85.22	
			Indeks Reformasi Hukum	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0
			Indeks Kualitas Kebijakan	83.59	84.00	84.00	85.00	85.00	0
			Laju Pertumbuhan Ekonomi	7%	7.5%	8%	8,50%	9%	0
			Indeks Kepuasan Masyarakat di Sekretariat Daerah Kota Batam	75	80	85	90	95	100

### 3.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Sekretariat Daerah mencapai tujuan dan sasaran renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

### **3.1.1 STRATEGI**

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan birokrasi menunjukkan pemerintahan daerah yang berdaya saing yaitu:

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola.
- Mengoptimalkan peran koordinasi lintas OPD.
- Mendorong penyederhanaan regulasi dan prosedur
- Mengoptimalkan koordinasi program pembangunan lintas sektor.
- Menguatkan tata kelola PBJ (pengadaan barang/jasa
- Meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan.
- Mendorong manajemen kinerja berbasis hasil
- Menguatkan transformasi budaya kerja ASN agar lebih adaptif terhadap perubahan

Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<p><b>Visi</b> : Batam Kota Madani yang Inovatif, Berbudaya dan Berkelanjutan Sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata</p> <p><b>Misi 4:</b> Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang <i>good governance</i></p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel, adaptif, kolaboratif, efektif dan efisien.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan hukum dan kesejahteraan rakyat yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh rakyat masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola.</li> <li>Mengoptimalkan peran koordinasi lintas PD.</li> <li>Mendorong penyederhanaan regulasi dan prosedur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan mekanisme akuntabilitas kinerja.</li> <li>Penyusunan SOP koordinasi lintas PD.</li> <li>Evaluasi regulasi yang tidak relevan.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya perekonomian dan pembangunan daerah kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan koordinasi program pembangunan lintas sektor.</li> <li>Menguatkan tata kelola PBJ (pengadaan barang/jasa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan dukungan fasilitasi kebijakan perekonomian dan pembangunan lintas PD.</li> <li>Peningkatan tata kelola pengadaan barang/jasa.</li> <li>Dukungan percepatan realisasi kegiatan prioritas pembangunan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan.</li> <li>Mendorong manajemen kinerja berbasis hasil</li> <li>Menguatkan transformasi budaya kerja ASN agar lebih adaptif terhadap perubahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan pelayanan administratif lintas PD.</li> <li>Peningkatan kualitas produk hukum dan fasilitasi MoU.</li> <li>Penerapan evaluasi kinerja berbasis output.</li> <li>Pengembangan SDM aparatur melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan</li> </ul>

Agar pelaksanaan Renstra dapat berjalan secara terarah dan terukur, maka diperlukan penahapan yang sistematis dan terencana yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan dalam konteks ini dimaksudkan sebagai pengelompokan atau pengurutan pelaksanaan strategi, program, dan kegiatan ke dalam tahapan tahunan yang disesuaikan dengan kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta dinamika lingkungan strategis. Strategi penahapan tertuang dalam Tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3. 3 Penahapan Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan transparansi dan akuntabilitas	Transformasi digitalisasi sistem administrasi	Penyederhanaan regulasi dan prosedur	Digitalisasi sistem administrasi	Peningkatan kualitas SDM aparatur
Transformasi digitalisasi sistem administrasi	Penyederhanaan regulasi dan prosedur	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas	Penerapan manajemen kinerja berbasis hasil
Penyederhanaan regulasi dan prosedur	Penerapan manajemen kinerja berbasis hasil	Digitalisasi sistem administrasi	Penerapan manajemen kinerja berbasis hasil	Penyederhanaan regulasi dan prosedur
Dukungan kebijakan manajemen kinerja berbasis hasil	Peningkatan kualitas SDM aparatur	Peningkatan kualitas SDM aparatur	Peningkatan kualitas SDM aparatur	Digitalisasi sistem administrasi
Peningkatan kualitas SDM aparatur	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas	Penerapan manajemen kinerja berbasis hasil	Penyederhanaan regulasi dan prosedur	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas

### 3.2.1. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Sekretariat Daerah agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Sekretariat Daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Sekretariat Daerah.

Tabel 3. 4 Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK/Sasaran RPJMD yang Relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Menyusun Kebijakan Pengoordinasian administratif terhadap	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital	Penguatan tata kelola internal melalui efisiensi sumber daya dan optimalisasi pengambilan keputusan	

No	Operasionalisasi NSPK/Sasaran RPJMD yang Relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	pelaksanaan tugas Peangkat Daerah serta Pelayanan administratif		Modernisasi birokrasi dengan pembangunan infrastruktur TI dan penerapan layanan digital (SPBE)	
			Pengembangan SDM aparatur melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan	
			Evaluasi kebijakan dan regulasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan daerah dan regulasi terbaru	
			Penguatan budaya kerja berbasis kinerja dengan sistem reward & punishment yang transparan	
			Digitalisasi administrasi untuk mendukung transparansi, mempercepat layanan, dan memperkuat monitoring & evaluasi	

Tabel 3.4 menggambarkan keterkaitan antara arah kebijakan RPJMD Kota Batam dengan arah kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam yang dijabarkan melalui operasionalisasi sasaran dan NSPK yang relevan. Tabel ini menunjukkan bahwa fokus utama kebijakan Sekretariat Daerah Kota Batam dalam periode 2025–2029 diarahkan pada penguatan tata kelola internal pemerintahan berbasis digital, modernisasi birokrasi, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, serta optimalisasi sistem pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel. Melalui arah kebijakan tersebut, Sekretariat Daerah Kota Batam diharapkan mampu berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, adaptif, serta mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan Kota Batam sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029.

## **BAB IV**

### **PROGRAM DAN KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJAPENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH**

Berdasarkan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah strategi yang lebih operasional untuk 5 (Lima) tahun ke depan periode 2025-2029 meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Batam dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Batam melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen Sekretariat Daerah untuk pencapaiannya setiap tahunnya.

Pada masa kampanye, Kepala Daerah terpilih mengusung serangkaian program kerja yang dirancang untuk menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program yang diusulkan adalah pemberian beasiswa perguruan tinggi masyarakat hinterland dan siswa berprestasi tidak mampu.

Janji kampanye ini diterjemahkan ke dalam kebijakan pembangunan dan diimplementasikan pada program prioritas pembangunan yang selaras dengan nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020. Dengan demikian tata kelola yang baik dan pembangunan yang efektif serta tepat sasaran dapat terwujud.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 dan telah dimutakhirkan, maka program unggulan pemberian beasiswa ini dituangkan dalam Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dengan Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah pada Subkegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri. Program ini dijabarkan dengan pemberian bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa yang telah lulus seleksi sebagaimana ketentuan.

Sebagai langkah awal, Sekretariat Daerah Kota Batam menyusun peraturan Wali Kota yang dapat memayungi secara hukum pelaksanaan pemberian beasiswa dimaksud. Selanjutnya menetapkan perguruan tinggi untuk melakukan kerja sama dan dituangkan ke dalam kesepakatan bersama.

Selain program unggulan, untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan Kota Batam maka Sekretariat Daerah Kota Batam menetapkan sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsinya. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kota Batam terdiri atas 3 (tiga) program, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 60 (enam puluh) sub kegiatan. Program yang ditetapkan yaitu:

1. Program Penunjang Urusn Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Program Perekonomian dan Pembangunan

Untuk lebih jelas dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 4.1 berikut ini, yang selanjutnya dipedomani dalam penyusunan rencana kerja tahunan Sekretariat Daerah Kota Batam.

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Program/ Outcome Kegiatan/ Subkegiatan Output
Menyusun kebijakan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta Pelayanan administratif		Meningkatkan koordinasi, fasilitasi, dan tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel, adaptif, kalaboratif, efektif dan efisien			Nilai LPPD	
		Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, hukum dan kesejahteraan rakyat yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat			Indeks Reformasi Birokrasi	
		Meningkatkan Pencapaian SPM Kota Batam			Indeks Reformasi Hukum	
		Meningkatnya Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat			Indeks Kualitas Kebijakan	
		Meningkatnya Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat			Persentase Pencapaian SPM Kota Batam(Dengan persatuan:Persentase)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya Kualitas Regulasi Daerah yang Implementatif			Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat (Dengan Satuan:Angka)	
		Meningkatnya Sinergi dan Kolaborasi antar lembaga melalui tindak lanjut MoU			Persentase Produk Hukum yang di Implementatif (dengan satuan: Persentase) (Dengan Satuan:Persentase)	
		Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan			Persentase MoU yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:persentase)	
		Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan			Persentase Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan (Dengan Satuan:Persentase)	Administrasi Tata Pemerintahan
		Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dengan Satuan:Dokumen)	Penataan Administrasi Pemerintahan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Dukung	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Program/ Outcome Kegiatan/ Subkegiatan
				Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayah (Dengan Satuan:Dokumen)	Pengelolaan Administrasi Kewilayah
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
				<b>Terlaksananya cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan sesuai kebutuhan</b>	<b>Persentase cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan sesuai kebutuhan (Dengan Satuan:Angka)</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
				Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dengan Satuan:Dokumen)	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Dukung	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Program/ Outcome Kegiatan/ Subkegiatan
				Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dengan Satuan:Dokumen)	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
				Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Dengan Satuan:Keluarga)	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
				<b>Terlaksananya produk Hukum yang diharmonisasikan dan sinkronisasikan</b>	<b>Persentase Produk Hukum yang diharmonisasikan dan sinkronisasikan (Dengan Satuan:Persentase)</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>
				Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
				Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Dengan Satuan:Kasus)	Fasilitasi Bantuan Hukum
				Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dengan Satuan:Dokumen)	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Dukung	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Program/ Outcome Kegiatan/ Subkegiatan
				Terlaksananya dokumen fasilitasi dalam negeri, luar negeri dan evaluasi pelaksanaan kerjasama yang dicap	Persentase jumlah dokumen fasilitasi dalam negeri, luar negeri dan evaluasi pelaksanaan kerjasama yang dicapai (Dengan Satuan:Persentase)	Fasilitasi Kerja Sama Daerah
				Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
				Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
				Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Dengan Satuan:Laporan)	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
	Meningkatnya perekonomian dan pembangunan daerah kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing			Laju Pertumbuhan Ekonomi. (Persentase)		
			Meningkatnya Sinergi dan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pemanfaatan Kebijakan Layanan Perekonomian (Dengan Satuan: Persentase) (Dengan Satuan:Persentase)	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Pembangunan	Persentase Realisasi Fisik Keuangan Kegiatan Prioritas (Dengan Satuan:Persentase)		
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tata Kelola Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa. (Dengan Satuan:Angka)		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Dukung	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Program/ Outcome Kegiatan/ Subkegiatan
				Meningkatnya Sinergi dalam Pelaksanaan Kebijakan Bidang SDA	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang disediakan (Dengan Satuan:Persentase)	
				<b>Terlaksananya rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian daerah yang ditindaklanjuti</b>	<b>Persentase Rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persentase)</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dengan Satuan:Dokumen)	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BLUD dan BUMD
				Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Dengan Satuan:Laporan)	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
				Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dengan Satuan:Dokumen)	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD (Dengan Satuan:Dokumen)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
				<b>Terlaksananya rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan yang dikeluarkan</b>	<b>Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan yang dikeluarkan (Dengan Satuan:angka)</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Dukung	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Program/ Outcome Kegiatan/ Subkegiatan
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
				Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Dengan Satuan:Laporan)	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
				Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Dengan Satuan:Laporan)	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
				<b>Terlaksananya proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa</b>	<b>Persentase proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (Dengan Satuan:Angka)</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>
				Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dengan Satuan:Dokumen)	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
				Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
				Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Dengan Satuan:Orang)	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
				<b>Terlaksananya rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang ditindaklanjuti</b>	<b>Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persentase)</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Dukung	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Program/ Outcome Kegiatan/ Subkegiatan
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dengan Satuan:Dokumen)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dengan Satuan:Dokumen)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dengan Satuan:Dokumen)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
		Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan			Indeks Kepuasan Masyarakat di Sekretariat Daerah Ko	
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan Sekretariat	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Indeks)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Dukung	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Program/ Outcome Kegiatan/ Subkegiatan
				<b>Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan danwaktu (Dengan Satuan:Percentase)</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan danwaktu (Dengan Satuan:Percentase)</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				<b>Terlaksananya layanan administrasi keuangan</b>	<b>Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan (Dengan Satuan:Percentase)</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				<b>Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan:Percentase)</b>	<b>Terlaksananya peningkatan kompetensi ASN</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Dukung	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Program/ Outcome Kegiatan/ Subkegiatan
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				<b>Terlaksananya layanan administrasi umum Sekretariat Daerah Kota Batam</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran (Dengan Satuan:Persentase)</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				<b>Terlaksananya pelaksanaan pengadaan BMD Sekretariat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan (Dengan Satuan:Persentase)</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Dukung	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Program/ Outcome Kegiatan/ Subkegiatan
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Pengadaan Mebel
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				<b>Tersedianya jasa penunjang urusan Seretariat Daerah Kota Batam</b>	<b>Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan (Dengan Satuan:Persentase)</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Dukung	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Program/ Outcome Kegiatan/ Subkegiatan
				<b>Terlaksananya pemeliharaan BMD Sekretariat Daerah Kota Batam</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik (Dengan Satuan:Persentase)</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				<b>Terlaksananya administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menerima layanan Administrasi Keuangan (Dengan Satuan:Persentase)</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Dukung	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Program/ Outcome Kegiatan/ Subkegiatan
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Dengan Satuan:Orang/Bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
				Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Dengan Satuan:Orang)	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
				Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Dengan Satuan:Orang/Bulan)	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
				<b>Terlaksananya fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Persentase Kegiatan Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Persentase)</b>	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>
				Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
				Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
				<b>meningkatnya level kematangan organisasi</b>	<b>Nilai Kematangan Organisasi (Dengan Satuan:Angka)</b>	<b>Penataan Organisasi</b>
				Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dengan Satuan:Dokumen)	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Dukung	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Program/ Outcome Kegiatan/ Subkegiatan
				Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dengan Satuan:Laporan)	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
				Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dengan Satuan:Dokumen)	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dengan Satuan:Dokumen)	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
				<b>Terlaksananya Keprotokolan Pimpinan Daerah</b>	<b>Persentase keprotokolan Pimpinan Daerah yang difasilitasi sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Persentase)</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>
				Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Dengan Satuan:Laporan)	Fasilitasi Keprotokolan
				Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Dengan Satuan:Laporan)	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
				Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Pendokumentasian Pimpinan Laporan Tugas (Dengan Satuan:Laporan)	Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Sumber: Corona Consulting, 2025

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa untuk mencapai sasaran diterjemahkan ke dalam *outcome*. Selanjutnya dijabarkan dalam *output* yang terukur dengan indikator kinerja yang spesifik dan relevan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan dan sub kegiatan. Sekretariat Daerah Kota Batam menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yaitu periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam renstra merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Batam selama periode lima tahun dimaksud. Program tahun 2030 juga ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025-2029 sebagai pijakan untuk penyusunan Renja Tahun 2030 sehingga dapat dinyatakan secara eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah.

Penetapan program dan kegiatan ini disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan visi misi Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam serta tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Batam. Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsinya dengan telah ditetapkannya program, kegiatan dan sub kegiatan maka perlu direncanakan pendanaan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi selama lima tahun ke depan. Rincian anggaran yang direncanakan sebagaimana Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4. 2 Program dan Kegiatan Pendanaan Sekretariat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							2025		2026		2027		2028		2029		2030					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, adaptif, kolaboratif, efektif dan efisien	Nilai LPPD (Status Kinerja)	3.41	3.47	3.41	139.294.611.000	3.42	138.957.880.350	3.44	136.769.250.000	3.46	137.497.250.000	3.47	137.942.200.000	3.49	138.555.000.000				
				Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	84.25	85.25	84.25	124.284.515.049	84.50	131.671.706.677	84.75	147.137.168.564	85.00	145.111.838.079	85.25	148.363.380.761	85.50	150.903.389.672				
			Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat	Indeks Reformasi Hukum (Angka)	90	90	90	136.857.405.600	90	136.874.314.750	90	134.125.000.000	90	134.282.250.000	90	134.922.200.000	90	135.365.000.000				
				Indeks Kualitas Kebijakan (Poin)	83.59	85	84	0	84	0	84	0	85	0	85	0	85	0				
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				136.857.405.600		136.874.314.750		134.125.000.000		134.282.250.000		134.922.200.000		135.365.000.000	677.061.170.350				
			Meningkatkan Pencapaian SPM Kota Batam	Persentase Pencapaian SPM Kota Batam (Dengan persatuan: Persentase) (Dengan Satuan:Angka)	94	96	94	6.639.269.000	94.5	4.917.014.050	95	5.060.000.000	95.5	5.125.000.000	96	5.185.000.000	96.5	5.235.000.000		KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN		
			Meningkatnya Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat (Dengan Satuan:Angka)	89.91	90.03	89.91	126.174.185.600	89.94	127.111.176.400	89.97	124.960.000.000	90.00	124.845.000.000	90.03	125.175.000.000	90.07	125.280.000.000		KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
			Meningkatnya Kualitas Regulasi Daerah yang Implementatif	Persentase Produk Hukum yang di Implementatif (dengan satuan: Persentase) (Dengan Satuan:Persentase)	100%	100%	100%	494.986.000	100%	617.714.800	100%	705.000.000	100%	740.000.000	100%	755.000.000	100%	795.000.000		KEPALA BAGIAN HUKUM		
			Meningkatnya Sinergi dan Kolaborasi antar lembaga melalui tindak lanjut MoU	Persentase MoU yang ditindaklanjuti ( Dengan Satuan:persentase)	100%	100%	100%	3.548.965.000	100%	4.228.409.500	100%	3.400.000.000	100%	3.572.250.000	100%	3.807.200.000	100%	4.055.000.000		KEPALA BAGIAN KERJASAMA		
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan				6.639.269.000		4.917.014.050		5.060.000.000		5.125.000.000		5.185.000.000		5.235.000.000	26.926.283.050				
			Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan ( Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	6.639.269.000	100	4.917.014.050	100	5.060.000.000	100	5.125.000.000	100	5.185.000.000	100	5.235.000.000		-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							2025		2026		2027		2028		2029		2030					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
		4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan				539.310.000		539.310.000		575.000.000		585.000.000		600.000.000		615.000.000	2.838.620.000				
			Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dengan Satuan:Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen			12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen				-		
		4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				903.092.000		103.092.000		935.000.000		965.000.000		985.000.000		995.000.000	3.891.184.000				
			Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dengan Satuan:Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen				-		
		4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				5.196.867.000		4.274.612.050		3.550.000.000		3.575.000.000		3.600.000.000		3.625.000.000	20.196.479.050				
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen			2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen				-		
		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				126.174.185.600		127.111.176.400		124.960.000.000		124.845.000.000		125.175.000.000		125.280.000.000	628.265.362.000				
			Terlaksananya cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan sesuai kebutuhan	Persentase cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan sesuai kebutuhan (Dengan Satuan:Angka)	100	100	100	126.174.185.600	100	127.111.176.400	100	124.960.000.000	100	124.845.000.000	100	125.175.000.000	100	125.280.000.000		-		
		4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				87.332.117.000		89.495.089.200		85.525.000.000		85.550.000.000		85.575.000.000		85.600.000.000	433.477.206.200				
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dengan Satuan:Dokumen)	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen			24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen				-		
		4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				26.764.446.000		23.766.000.000		27.275.000.000		27.100.000.000		27.325.000.000		27.330.000.000	132.230.446.000				
			Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dengan Satuan:Dokumen)	200 Dokumen	200 Dokumen	200 Dokumen			200 Dokumen		200 Dokumen		200 Dokumen		200 Dokumen				-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							2025		2026		2027		2028		2029					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat				11.122.017.600		12.938.087.200		11.175.000.000		11.200.000.000		11.225.000.000		11.250.000.000	57.660.104.800		
			Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dengan Satuan:Dokumen)	14	Dokumen	14	Dokumen	14	Dokumen	14	Dokumen	14	Dokumen	14	Dokumen	-			
		4.01.02.2.02.0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				955.605.000		912.000.000		985.000.000		995.000.000		1.050.000.000		1.100.000.000	4.897.605.000		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Dengan Satuan:Keluarga)	1440	Keluarga	900	Keluarga	1440	Keluarga	900	Keluarga	900	Keluarga	900	Keluarga	-			
		4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				494.986.000		617.714.800		705.000.000		740.000.000		755.000.000		795.000.000	3.312.700.800		
			Terlaksananya produk Hukum yang diharmonisasikan dan sinkronisasikan	Persentase Produk Hukum yang diharmonisasikan dan sinkronisasikan (Dengan Persentase)	100%	100%	100%	494.986.000	100%	617.714.800	100%	705.000.000	100%	740.000.000	100%	755.000.000	100%	795.000.000	-	
		4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				11.951.000		11.949.900		25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000	113.900.900		
			Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	410	Dokumen	410	Dokumen	410	Dokumen	410	Dokumen	410	Dokumen	410	Dokumen	-			
		4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum				479.717.000		602.489.000		650.000.000		675.000.000		685.000.000		705.000.000	3.092.206.000		
			Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Dengan Satuan:Kasus)	8 Kasus	8 Kasus	8 Kasus		8 Kasus		8 Kasus		8 Kasus		8 Kasus		8 Kasus	-		
		4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasi dan Pengelolaan Informasi Hukum				3.318.000		3.275.900		30.000.000		35.000.000		35.000.000		50.000.000	106.593.900		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							2025		2026		2027		2028		2029		2030					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dengan Satuan:Dokumen)	410 Dokumen	410 Dokumen	410 Dokumen		410 Dokumen	410 Dokumen	410 Dokumen		410 Dokumen		410 Dokumen	410 Dokumen			-			
		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah					3.548.965.000		4.228.409.500		3.400.000.000		3.572.250.000		3.807.200.000		4.055.000.000	18.556.824.500			
			Terlaksananya dokumen fasilitasi dalam negeri, luar negeri dan evaluasi pelaksanaan kerjasama yang dicapai	Percentase jumlah dokumen fasilitasi dalam negeri, luar negeri dan evaluasi pelaksanaan kerjasama yang dicapai (Dengan Satuan:Percentase)	100	100	100	3.548.965.000	100	4.228.409.500	100	3.400.000.000	100	3.572.250.000	100	3.807.200.000	100	4.055.000.000		-		
		4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri					3.380.000.000		4.080.000.000		3.100.000.000		3.197.250.000		3.357.200.000		3.530.000.000	17.114.450.000			
			Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dengan Satuan:Dokumen)	20	20	20		20		20		20		20		20			-		
		4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri					53.190.000		42.775.500		150.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000	695.965.500			
			Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dengan Satuan:Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			-		
		4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama					115.775.000		105.634.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000		225.000.000	746.409.000			
			Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Dengan Satuan:Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan			-		
	Meningkatnya perekonomian dan pembangunan daerah kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing			Laju Pertumbuhan Ekonomi. (Percentase)	7%	9%	7%	2.437.205.400	7.5%	2.083.565.600	8%	2.644.250.000	8.5%	3.215.000.000	9%	3.020.000.000	9.5%	3.190.000.000				
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						2.437.205.400		2.264.315.600		2.825.000.000		3.415.000.000		3.220.000.000		3.390.000.000	14.161.521.000			
		Meningkatnya Sinergi dan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Percentase Pemanfaatan Kebijakan Layanan Perekonomian (Dengan Satuan:Percentase) (Dengan Satuan:Percentase)	100%	100%	100%	763.130.000	100%	671.546.900	100%	829.250.000	100%	835.000.000	100%	870.000.000	100%	895.000.000		KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN		
		Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Pembangunan		Percentase Realisasi Fisik Kegiatan Prioritas (Dengan Satuan:Percentase)	0	98	95	146.935.000	95	146.869.000	96	265.000.000	97	730.000.000	98	400.000.000	99	460.000.000		KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							2025		2026		2027		2028		2029		2030					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tata Kelola Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa. (Dengan Satuan:Angka)	85	89	85	1.366.740.400	86	1.109.377.700	87	1.325.000.000	88	1.395.000.000	89	1.465.000.000	90	1.520.000.000		KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
			Meningkatnya Sinergi dalam Pelaksanaan Kebijakan Bidang SDA	Percentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang disediakan (Dengan Satuan:Persentase)	100%	100%	100%	160.400.000	100%	155.772.000	100%	225.000.000	100%	255.000.000	100%	285.000.000	100%	315.000.000		KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM		
		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					763.130.000		852.296.900		1.010.000.000		1.035.000.000		1.070.000.000		1.095.000.000	4.730.426.900			
			Terlaksananya rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	Percentase Rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persentase)	100%	100%	100%	763.130.000	100%	671.546.900	100%	829.250.000	100%	835.000.000	100%	870.000.000	100%	895.000.000		-		
		4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD					115.680.000		85.428.500		154.250.000		145.000.000		165.000.000		175.000.000	665.358.500			
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dengan Satuan:Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dengan Satuan:Dokumen)	6	6	6		4		6		6		6		6			-		
		4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian					563.860.000		491.965.000		585.000.000		595.000.000		605.000.000		615.000.000	2.840.825.000			
			Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Dengan Satuan:Laporan)	4 Laporan	4	4		4		4		4		4		4			-		
		4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil					83.590.000		94.153.400		90.000.000		95.000.000		100.000.000		105.000.000	462.743.400			
			Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	5		4		5		5		5		5			-		
		4.01.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)					0		180.750.000		180.750.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	761.500.000			
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD (Dengan Satuan:Dokumen)																-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							2025		2026		2027		2028		2029		2030					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
		4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan					146.935.000		146.869.000		265.000.000		730.000.000		400.000.000		460.000.000	1.688.804.000			
			Terlaksananya rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan yang dikeluarkan	Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan yang dikeluarkan (Dengan Satuan:angka)	96	98	96	146.935.000	96.5	146.869.000	97	265.000.000	97.5	730.000.000	98	400.000.000	98.5	460.000.000	-			
		4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan					60.720.000		60.720.000		105.000.000		125.000.000		150.000.000		175.000.000	501.440.000			
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			-		
		4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan					53.230.000		53.211.000		85.000.000		105.000.000		125.000.000		135.000.000	421.441.000			
			Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Dengan Satuan:Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan			-		
		4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan					32.985.000		32.938.000		75.000.000		500.000.000		125.000.000		150.000.000	765.923.000			
			Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Dengan Satuan:Laporan)	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan				2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan			-		
		4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					1.366.740.400		1.109.377.700		1.325.000.000		1.395.000.000		1.465.000.000		1.520.000.000	6.661.118.100			
			Terlaksananya proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Persentase proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (Dengan Satuan:Angka)	85	89	85	1.366.740.400	86	1.109.377.700	87	1.325.000.000	88	1.395.000.000	89	1.465.000.000	90	1.520.000.000		-		
		4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					479.842.000		429.842.000		375.000.000		400.000.000		425.000.000		450.000.000	2.109.684.000			
			Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dengan Satuan:Dokumen)	400 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen				150 Dokumen		150 Dokumen		150 Dokumen		150 Dokumen			-		
		4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					794.326.400		586.964.700		825.000.000		850.000.000		875.000.000		885.000.000	3.931.291.100			
			Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)	50 Dokumen	250 Dokumen	250 Dokumen				250 Dokumen		250 Dokumen		250 Dokumen		250 Dokumen			-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					92.572.000		92.571.000		125.000.000		145.000.000		165.000.000		185.000.000	620.143.000	
			Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Dengan Satuan:Orang)	450 Orang	450 Orang	450 Orang		450 Orang		450 Orang		450 Orang		450 Orang		450 Orang		-	
		4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam					160.400.000		155.772.000		225.000.000		255.000.000		285.000.000		315.000.000	1.081.172.000	
			Terlaksananya rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persentase)	100%	100%	100%	160.400.000	100%	155.772.000	100%	225.000.000	100%	255.000.000	100%	285.000.000	100%	315.000.000	-	
		4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan					48.618.000		70.444.000		75.000.000		85.000.000		95.000.000		105.000.000	374.062.000	
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dengan Satuan:Dokumen)	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		-	
		4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup					37.214.000		37.104.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	284.318.000	
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dengan Satuan:Dokumen)	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		-	
		4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air					74.568.000		48.224.000		90.000.000		100.000.000		110.000.000		120.000.000	422.792.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							2025		2026		2027		2028		2029					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahanan (Dengan Satuan:Dokumen)	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	-			
	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan		Indeks Kepuasan Masyarakat di Sekretariat Daerah Kota Batam (Point)	75	95	75	124.284.515.049	80	131.671.706.677	85	147.137.168.564	90	145.111.838.079	95	148.363.380.761	100	150.903.389.672			
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				124.284.515.049		131.671.706.677		147.137.168.564		145.111.838.079		148.363.380.761		150.903.389.672	696.568.609.130		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Indeks)	90.26	90.38	90.26	123.278.843.149	90.29	130.632.412.077	90.32	145.767.798.564	90.35	143.630.143.079	90.38	146.776.665.561	90.42	149.228.758.672	KEPALA BAGIAN UMUM	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	71.71	80.21	72.46	1.005.671.900	74.11	1.039.294.600	75.21	1.369.370.000	77.21	1.481.695.000	80.21	1.586.715.200	82.21	1.674.631.000	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				193.344.000		216.966.700		434.370.000		466.695.000		501.715.200		539.631.000	1.813.090.900		
			Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Sekretariat Daerah Kota Batam	Percentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu (Dengan Satuan:Percentase)	100%	100%	100%	193.344.000	100%	216.966.700	100%	434.370.000	100%	466.695.000	100%	501.715.200	100%	539.631.000	-	
		4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				106.258.000		125.664.000		212.120.000		233.332.000		256.665.200		282.331.000	934.039.200		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	3	2	3		2		3		2		2		3		-	
		4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				87.086.000		0		0		0		0		0	87.086.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							2025		2026		2027		2028		2029		2030					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	NA	1		NA		-											
		4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		91.302.700		222.250.000		233.363.000		245.050.000		257.300.000		791.965.700			
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	NA	3	NA		3		3		3		3		3		-			
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				55.287.953.967		55.282.197.367		67.810.316.564		63.760.707.079		64.853.941.561		66.175.355.672		306.995.116.538			
			Terlaksananya layanan administrasi keuangan	Percentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan (Dengan Satuan:Percentase)	100%	100%	100%	55.287.953.967	100%	55.282.197.367	100%	67.810.316.564	100%	63.760.707.079	100%	64.853.941.561	100%	66.175.355.672	-			
		4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				55.059.413.967		55.053.657.367		67.558.922.564		63.484.074.079		64.549.755.561		65.840.750.672		305.705.823.538			
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	215	348	215		308		338		343		348		353		-			
		4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				228.540.000		228.540.000		251.394.000		276.633.000		304.186.000		334.605.000		1.289.293.000			
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		12		-			
		4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaihan Perangkat Daerah				178.676.000		178.676.000		785.639.000		819.232.000		854.031.000		890.096.000		2.816.254.000			
			Terlaksananya peningkatan kompetensi ASN	Percentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan:Percentase)	100%	100%	100%	178.676.000	100%	178.676.000	100%	785.639.000	100%	819.232.000	100%	854.031.000	100%	890.096.000	-			
		4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		303.392.000		312.873.000		322.354.000		331.835.000		938.619.000			
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	0	350	0		0		330		340		350		360		-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							2025		2026		2027		2028		2029					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		178.676.000		482.247.000		506.359.000		531.677.000		558.261.000	1.698.959.000		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	NA	49	NA		14		39		44		49		54		-	
		4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				178.676.000		0		0		0		0		0	178.676.000		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	14	NA	14		NA		-									
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				12.361.013.440		14.951.412.500		19.700.364.000		19.931.137.000		20.371.629.000		20.687.763.000	87.315.555.940		
			Terlaksananya layanan administrasi umum Sekretariat Daerah Kota Batam	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran (Dengan Satuan:Persentase)	100%	100%	100%	12.361.013.440	100%	14.951.412.500	100%	19.700.364.000	100%	19.931.137.000	100%	20.371.629.000	100%	20.687.763.000	-	
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.123.127.000		2.552.382.700		3.676.599.000		3.586.897.000		3.700.504.000		3.778.514.000	15.639.509.700		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	7	7	7		7		7		7		7		7		-	
		4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.561.957.600		6.016.467.800		9.159.779.000		9.342.975.000		9.529.834.000		9.625.132.000	39.611.013.400		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	7	7	7		5		7		7		7		7		-	
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				575.390.000		727.527.000		743.916.000		758.794.000		773.970.000		789.450.000	3.579.597.000		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	3	3		3		3		3		3		3		-	
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4.100.538.840		5.655.035.000		6.120.070.000		6.242.471.000		6.367.321.000		6.494.667.000	28.485.435.840		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		12		-	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							2025		2026		2027		2028		2029		2030					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.120.555.000		11.045.185.200		5.951.450.000		6.551.450.000		7.126.450.000		7.201.450.000	35.795.090.200			
			Terlaksananya pelaksanaan pengadaan BMD Sekretariat Daerah	Percentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan (Dengan Satuan:Persentase)	100%	100%	100%	5.120.555.000	100%	11.045.185.200	100%	5.951.450.000	100%	6.551.450.000	100%	7.126.450.000	100%	7.201.450.000		-		
		4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					484.095.000		8.404.570.000		2.000.000.000		2.500.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000	16.388.665.000			
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	6	0		8		4		5		6		6			-		
		4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0		718.252.000		751.450.000		751.450.000		751.450.000		751.450.000	2.972.602.000			
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	2	2		1		2		2		2		2			-		
		4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					977.109.000		413.191.400		1.000.000.000		1.050.000.000		1.100.000.000		1.150.000.000	4.540.300.400			
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	245	115	245		76		85		100		115		130			-		
		4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					3.659.351.000		1.509.171.800		2.200.000.000		2.250.000.000		2.275.000.000		2.300.000.000	11.893.522.800			
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	160	90	160		56		70		80		90		100			-		
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					15.241.248.040		13.176.420.852		15.550.000.000		15.900.000.000		16.250.000.000		16.475.000.000	76.117.668.892			
			Tersedianya jasa penunjang urusan Seretariat Daerah Kota Batam	Percentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan (Dengan Satuan:Persentase)	100%	100%	100%	15.241.248.040	100%	13.176.420.852	100%	15.550.000.000	100%	15.900.000.000	100%	16.250.000.000	100%	16.475.000.000		-		
		4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					7.879.570.000		8.025.926.600		8.200.000.000		8.400.000.000		8.600.000.000		8.700.000.000	41.105.496.600			
			Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		12			-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							2025		2026		2027		2028		2029		2030					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
		4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				576.889.000		1.117.526.500		750.000.000		800.000.000		850.000.000		875.000.000	4.094.415.500				
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12			12		12		12		12		12		-		
		4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				6.784.789.040		4.032.967.752		6.600.000.000		6.700.000.000		6.800.000.000		6.900.000.000	30.917.756.792				
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12			12		12		12		12		12		-		
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24.220.426.273		24.183.398.929		24.870.629.000		25.381.747.000		25.893.199.000		26.204.994.000	124.549.400.202				
			Terlaksananya pemeliharaan BMD Sekretariat Daerah Kota Batam	Percentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik (Dengan Satuan:Percentase)	100%	100%	100%	24.220.426.273	100%	24.183.398.929	100%	24.870.629.000	100%	25.381.747.000	100%	25.893.199.000	100%	26.204.994.000				
		4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan				352.960.000		351.760.000		370.629.000		381.747.000		393.199.000		404.994.000	1.850.295.000				
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	9	9	9			9		9		9		9		9		-		
		4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				15.953.168.000		14.993.511.900		16.250.000.000		16.500.000.000		16.750.000.000		17.000.000.000	80.446.679.900				
			Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	120	127	120			121		123		125		127		129		-		
		4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		2.057.145.000		2.160.000.000		2.268.000.000		2.382.000.000		2.430.000.000	8.867.145.000				
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)		869	859			825		839		849		859		869		-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							2025		2026		2027		2028		2029		2030					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
		4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					7.914.298.273		6.780.982.029		6.090.000.000		6.232.000.000		6.368.000.000		6.370.000.000	33.385.280.302			
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang akan Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	10	10	10		10		10		10		10		10		-			
		4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					6.182.189.929		6.524.505.829		6.319.400.000		6.410.870.000		6.472.415.000		6.534.100.000	31.909.380.758			
			Terlaksananya administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menerima layanan Administrasi Keuangan (Dengan Satuan:Persentase)	100%	100%	100%	6.182.189.929	100%	6.524.505.829	100%	6.319.400.000	100%	6.410.870.000	100%	6.472.415.000	100%	6.534.100.000	-			
		4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					4.023.100.129		4.023.100.129		4.050.000.000		4.100.000.000		4.150.000.000		4.200.000.000	20.346.200.258			
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Dengan Satuan:Orang/Bulan)	2	2	2		2		2		2		2		2		-			
		4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					28.000.000		28.000.000		29.400.000		30.870.000		32.415.000		34.100.000	148.685.000			
			Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Dengan Satuan:Orang)	8	8	8		8		8		8		8		8		-			
		4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2.131.089.800		2.473.405.700		2.240.000.000		2.280.000.000		2.290.000.000		2.300.000.000	11.414.495.500			
			Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Dengan Satuan:Orang/Bulan)	2	2	2		2		2		2		2		2		-			
		4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah					4.170.676.500		4.760.444.500		4.200.000.000		4.245.000.000		4.275.000.000		4.335.000.000	21.651.121.000			
			Terlaksananya fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kegiatan Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Persentase)	100%	100%	100%	4.170.676.500	100%	4.760.444.500	100%	4.200.000.000	100%	4.245.000.000	100%	4.275.000.000	100%	4.335.000.000	-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							2025		2026		2027		2028		2029					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				2.683.840.700		2.694.115.500		2.700.000.000		2.725.000.000		2.750.000.000		2.785.000.000	13.552.956.200		
			Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	8	7	8		7		7		7		7		7		-	
		4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				1.486.835.800		2.066.329.000		1.500.000.000		1.520.000.000		1.525.000.000		1.550.000.000	8.098.164.800		
			Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	8	7	8		7		7		7		7		7		-	
		4.01.01.2.13	Penataan Organisasi				812.327.900		822.327.900		935.000.000		1.015.000.000		1.085.000.000		1.135.000.000	4.669.655.800		
			meningkatnya level kematangan organisasi	Nilai Kematangan Organisasi (Dengan Satuan:Angka)	46	48	46	812.327.900	46.5	822.327.900	47.	935.000.000	47.5	1.015.000.000	48	1.085.000.000	48.5	1.135.000.000		-
		4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				195.822.000		205.822.000		250.000.000		275.000.000		285.000.000		295.000.000	1.211.644.000		
			Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		4		-	
		4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				233.416.000		233.416.000		245.000.000		255.000.000		275.000.000		285.000.000	1.241.832.000		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dengan Satuan:Laporan)	3	3	3		3		3		3		3		3		-	
		4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				98.034.000		98.034.000		115.000.000		125.000.000		135.000.000		145.000.000	571.068.000		
			Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dengan Satuan:Dokumen)	44	44	44		44		44		44		44		44		-	
		4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				236.850.900		236.850.900		250.000.000		275.000.000		285.000.000		295.000.000	1.283.701.800		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		1		-	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							2025		2026		2027		2028		2029		2030					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
		4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					48.205.000		48.205.000		75.000.000		85.000.000		105.000.000		115.000.000	361.410.000			
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1			1		1		1		1		1		-		
		4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					516.104.000		530.170.900		580.000.000		630.000.000		680.000.000		725.000.000	2.936.274.900			
			Terlaksananya Keprotokolan Pimpinan Daerah	Persentase keprotokolan Pimpinan Daerah yang difasilitasi sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Persentase)	100%	100%	100%	516.104.000	100%	530.170.900	100%	580.000.000	100%	630.000.000	100%	680.000.000	100%	725.000.000		-		
		4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan					317.354.000		305.149.400		375.000.000		395.000.000		410.000.000		425.000.000	1.802.503.400			
			Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Dengan Satuan:Laporan)	50	50	50		50		50		50		50		50			-		
		4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					197.455.000		223.750.000		130.000.000		150.000.000		175.000.000		195.000.000	876.205.000			
			Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Dengan Satuan:Laporan)	36	36	36		36		36		36		36		36			-		
		4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan					1.295.000		1.271.500		75.000.000		85.000.000		95.000.000		105.000.000	257.566.500			
			Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		2			-		
TOTAL:						263.579.126.049		270.810.337.027		284.087.168.564		282.809.088.079		286.505.580.761		289.658.389.672		1.387.791.300.480				

Sumber: Corona Consulting

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatkan Pencapaian SPM Kota Batam	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	
			Penataan Administrasi Pemerintahan	
			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
		Meningkatnya Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
		Meningkatnya Kualitas Regulasi Daerah yang Implementatif	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
			Fasilitasi Bantuan Hukum	
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
		Meningkatnya Sinergi dan Kolaborasi antar lembaga melalui tindak lanjut MoU	<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	
			Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
			Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	
			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Sinergi dan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan	
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	
		Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Pembangunan	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	
			Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
			Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
			Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tata Kelola Barang dan Jasa	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
		Meningkatnya Sinergi dalam Pelaksanaan Kebijakan Bidang SDA	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			<b>Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah</b>	
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
			<b>Penataan Organisasi</b>	
			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
			<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	
			Fasilitasi Keprotokolan	
			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
			Pendokumentasian Tugas Pimpinan	

Sumber : Corona Consulting, 2025

## 4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel ini.

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Batam

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nilai LPPD	Status Kinerja	3.41	3.42	3.44	3.46	3.47	3.49	
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	84,25	84,50	84,75	85,00	85,25	85.50	

Di samping Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Batam yang mendukung langsung pencapaian kinerja visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2025-2029, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja yang selaras dengan indikator kinerja pada level Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah Kota Batam

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	21	22	23	24	25	26	
2.	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	20,5	21	21,5	22	22,5	23	
3.	Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	40	40	40	40	40	40	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi RPJMD Kota Batam untuk lima tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Sekretariat Daerah Kota Batam dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan unsur pendukung urusan pemerintahan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Daerah Kota Batam. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029. Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah Kota Batam.

Permasalahan sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Sekretariat Daerah Kota Batam. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Batam.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Sekretariat Daerah Kota Batam. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Sekretariat Daerah Kota Batam sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan Kota Batam.

Apabila dikemudian hari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WALI KOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD